

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Spesialisasi Ilmu Ekonomi Regional

Dalam proses pengakuan cabang ilmu yang baru, dibutuhkan perbedaan sudut pandang yang substansial antara cabang ilmu yang baru dengan cabang ilmu yang sudah ada dengan tujuan memperluas hasil analisis (Sjafrizal, 2018). Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang, cabang ilmu tetap menggunakan teori dan konsep dasar yang sama dengan induk ilmunya (Sjafrizal, 2018).

Ilmu ekonomi regional adalah cabang dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi regional memiliki perbedaan sudut pandang dengan ilmu ekonomi klasik, namun tetap menggunakan teori dan konsep dasar yang sama. Dengan demikian, terdapat sifat spesial/khas di dalam ilmu ekonomi regional.

Sifat khas dari ilmu ekonomi regional dapat diidentifikasi dengan merujuk pada pemikiran seorang ekonom beraliran klasik bernama Paul Samuelson yang menyatakan bahwa permasalahan utama dari ilmu ekonomi terdiri dari tiga hal, yaitu (Samuelson, 1955) :

1. Barang dan/atau jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi (*What to produce and in what quantities*). Permasalahan

produksi berkaitan erat dengan permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, salah satu masalah yang dihadapi produsen adalah seberapa banyak komoditas yang akan diproduksi. Jika mereka salah kalkulasi, barang/jasa berpotensi tidak laku dan produsen merugi.

Pada sisi penawaran, timbul berbagai masalah seperti keterbatasan modal produsen, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi untuk memproduksi, dsb. Sebagai contoh, Indonesia memiliki kualitas SDM yang rendah berdasarkan Laporan “*The Human Capital Index (HCI) 2020*” yang diterbitkan oleh World Bank menyatakan bahwa skor HCI Indonesia menduduki peringkat 87 dari 174 negara (World Bank, 2021). Selain itu Laporan Human Development Index (HDI) 2020 menyatakan skor HDI Indonesia berada pada peringkat 111 dari 189 negara (United Nation Development Programme, 2020). Rendahnya kualitas SDM ini menjadi masalah pada produsen untuk menentukan apa produk yang tepat untuk diproduksi dengan kualitas SDM yang rendah. Sebagian besar produsen di Indonesia yang sering melakukan ekspor lebih memilih untuk membuat produk berupa barang mentah yang harganya cenderung murah daripada barang barang jadi yang punya *added value* dan harganya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa >70% ekspor Indonesia pada PDB 2021 berupa produk mentah dan Indonesia menjadi eksportir barang mentah terbesar di OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) pada tahun 2019 yang terdiri dari 57 negara (Andri, 2019)

2. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut (**How**). Setelah mengetahui apa yang akan diproduksi dan berapa kuantitas barang dan/atau jasa yang ingin diproduksi, produsen menghadapi masalah bagaimana cara memproduksi barang tersebut dengan efisien dimana sumber daya/biaya yang digunakan seminimal mungkin dan hasil/keuntungan yang diperoleh semaksimal mungkin. Contoh permasalahan yang dihadapi seperti berapa jumlah karyawan, apakah menggunakan sistem yang cenderung padat karya atau padat teknologi, bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan negara terkait kegiatan proses produksi tersebut.
3. Untuk Siapa Barang atau bagaimana pembagian hasil produksi (**For Whom**)
Ketika barang/jasa telah selesai diproduksi, maka permasalahan selanjutnya adalah bagaimana pengalokasian akan keuntungan dari hasil produksi tersebut. Hal ini terkait dengan pembagian upah/keuntungan bagi karyawan, pembayaran dividen bagi pemilik modal, pembayaran terhadap penyedia bahan baku, pembayaran pajak, dsb.

Ketiga permasalahan diatas yang meliputi *What*, *How*, dan *For Whom* digunakan dalam ekonomi klasik. Seiring berjalannya waktu, muncul pemikiran baru yang berusaha menjawab pertanyaan baru yaitu :

4. Kapan berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan (**When**). Para ekonom memasukkan unsur waktu dalam menganalisis perekonomian yang kemudian disebut dengan teori ekonomi dinamis. Pertanyaan ini melahirkan berbagai output seperti teori pertumbuhan ekonomi, *business cycle theory* yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi

mengalami pergerakan naik (apresiasi) dan turun (depresiasi) pada jangka waktu yang panjang maupun pendek, dan teori-teori lainnya.

Keempat permasalahan ini ternyata memiliki celah yang belum ditangani dengan baik. Sebagian besar ekonom tradisional secara implisit menganggap bahwa teori dan prinsip yang menjadi solusi dari permasalahan *what, how, for whom, when* dapat diterapkan dimana saja baik itu di kota besar maupun di daerah rural (Tarigan, 2005). Namun, kenyataannya tidak demikian.

Teori dan prinsip tersebut tidak dapat berlaku mutlak di semua wilayah karena karakteristik tiap-tiap wilayah tidak sama mutlak (Tarigan, 2005). Perbedaan karakteristik antar wilayah meliputi demografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, budaya, dll.

Ilmu ekonomi regional berusaha menjawab permasalahan tersebut dengan memasukkan unsur baru dalam analisisnya, yaitu :

5. Dimana lokasi kegiatan ekonomi tersebut dilakukan (**Where**). Ilmu ekonomi regional melibatkan unsur lokasi dalam analisis ekonomi yang diabaikan oleh sebagian besar ekonom tradisional. Sebagai contoh, lokasi dimana kegiatan produksi dilakukan berpengaruh terhadap efisiensi biaya produksi. Tiap daerah memiliki perbedaan upah buruh, kondisi geografis, aksesibilitas terhadap pusat pasar, dll. Perbedaan ini akan menyebabkan variasi biaya produksi. Pelaku produksi dapat memilih wilayah mana yang memiliki biaya produksi paling efisien dan memberi keuntungan paling maksimal dengan berlandaskan pada ilmu ekonomi regional.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi regional memiliki sifat khusus yaitu memasukkan unsur wilayah (*where*) dalam proses analisisnya. Hal ini tidak dilakukan oleh ekonomi klasik yang hanya memasukkan unsur *what, how, for whom, dan when* saja.

2.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Sektor unggulan suatu wilayah berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana terjadi peningkatan atas produksi barang dan jasa ekonomi suatu wilayah yang didukung oleh kemajuan teknologi dalam hal pengefisienan penggunaan faktor produksi, kebijakan institusional, dan ideologi yang dianut (Simon, 1971).

Menurut (Simon, 1971) terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi. Pertama, pertumbuhan penduduk memiliki laju yang tinggi diikuti oleh peningkatan pendapatan perkapita. Kedua, adanya perkembangan produktivitas yang membuat output produksi semakin besar dan input produksi semakin kecil. Ketiga, adanya pertumbuhan yang tinggi terhadap struktur perekonomian. Keempat, tingkat perpindahan populasi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi) yang tinggi. Kelima, negara maju melakukan ekspansi ekonomi ke negara lain dalam bentuk investasi. Keenam, adanya ekspor-impor di berbagai negara baik dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan modal.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.3.1 Pengertian Dasar PDRB

Sub Bab sebelumnya telah membahas pertumbuhan ekonomi. Dalam teori tersebut terdapat model yang digunakan sebagai tolak ukur apakah suatu wilayah

mengalami pertumbuhan ekonomi atau tidak. Dalam model tersebut terdapat beberapa variabel yang digunakan. Salah satu variabel yang sering digunakan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, PDRB juga menjadi variabel penting dalam menganalisis sektor unggulan.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai tambah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh keseluruhan unit usaha dalam suatu negara yang diperoleh dari kegiatan ekonomi unit usaha tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total nilai tambah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh keseluruhan unit usaha dalam suatu kota/kabupaten yang diperoleh dari kegiatan ekonomi unit usaha tersebut. Secara sederhana, perbedaan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terletak pada luas cakupan wilayah. PDB mencakup wilayah negara, sedangkan PDRB mencakup wilayah kota/kabupaten. Selain cakupan wilayah, tidak ada perbedaan signifikan antara PDB dan PDRB.

Dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan perincian nilai tambah barang dan/atau jasa berdasarkan sektor. Berikut ini contoh PDRB dan sektor-sektornya :

Gambar II. 1 PDRB Kota Medan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019

Lapangan Usaha <i>Industrial Origin</i>		2019*
(1)		(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2 692 138.20
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	2 376.95
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	34 414 457.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	221 608.33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	457 860.92
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	46 722 922.99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	61 710 075.99
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	15 395 335.18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	7 351 234.79
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	12 442 785.52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	14 668 092.52
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	21 459 983.51
M,N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	6 463 389.25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4 380 479.54
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	6 150 105.68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4 119 498.55
R,S,T,U	Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	2 830 004.58
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product		241.482.349.90

Sumber : BPS Kota Medan (2020)

PDRB dihitung dengan dua jenis harga yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Harga berlaku yang dimaksud adalah harga barang dan/atau jasa setiap tahun sesuai dengan tahun PDRB tersebut. Sebagai contoh, PDRB tahun 2019 menggunakan harga barang dan/atau jasa di tahun 2019, begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Sementara, harga konstan yang dimaksud adalah harga barang dan/jasa pada tahun tertentu yang dipilih sebagai acuan dasar. Sebagai contoh, PDRB tahun 2015, 2016, 2017, 2019 dihitung menggunakan harga barang dan/jasa yang sama (konstan) yaitu harga pada tahun 2015.

2.3.2 Konsep Nilai Tambah Pada PDRB

Perhitungan PDRB bukan dengan menjumlahkan nilai produk/total harga, melainkan menjumlahkan nilai tambah (*added value*) dari barang dan/atau jasa. Nilai produksi dan nilai tambah merupakan dua hal yang berbeda. Di dalam nilai produksi terdapat biaya antara (*intermediet cost*) yang meliputi biaya pembelian bahan baku yang dihasilkan oleh sektor/unit usaha lain. Sementara, nilai tambah bruto tidak terdapat biaya antara tersebut. Nilai tambah bruto hanya mencerminkan nilai atau “keuntungan” yang diperoleh manusia dari pengubahan barang A menjadi barang B.

Sebagai contoh, restoran ayam geprek yang menyewa ruko besar di Jakarta Selatan memiliki 20 karyawan. Satu porsi ayam geprek beserta nasi dijual seharga Rp 40.000 . Harga jual inilah yang disebut dengan nilai produksi/nilai penjualan. Nilai produksi ayam geprek tersebut tersebut terdiri dari biaya sewa ruko, biaya pembelian : ayam mentah, minyak goreng, beras, tepung, cabe , garam, dsb. Biaya yang dikeluarkan ini telah dihitung di sektor lain. Misalnya, biaya sewa ruko telah dimasukkan BPS dalam menghitung PDRB sektor real estat. Dengan demikian, jika kita tetap memasukkan biaya sewa ruko pada harga ayam geprek untuk dicatat pada sektor makanan dan minuman di PDRB, maka terjadi pencatatan ganda (*double-counting*) pada sektor real estat dan sektor makanan dan minuman. Hal yang sama berlaku juga pada biaya pembelian beras. Biaya ini telah dihitung di sektor pertanian pada PDRB.

Berdasarkan contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya antara (*intermediet cost*) adalah biaya yang sudah dihitung di sektor lain. Untuk

memperoleh nilai tambah (*added value*), kita harus mengurangkan harga jual dengan biaya antara. Dengan demikian, nilai tambah (*added value*) akan mencerminkan tingkat kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang dimaksud tidak hanya pendapatan bagi pemilik resto ayam geprek tadi, melainkan mencakup pendapatan yang diperoleh karyawan resto, pemilik ruko, dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, nilai tambah bruto terdiri gaji, laba, sewa tanah dan/atau bangunan, bunga uang yang dibayarkan, penyusutan, dan pajak tidak langsung (neto).

Berikut ini contoh kalkulasi nilai tambah bruto, seorang tuan tanah memiliki sawah seluas 1 Ha yang ditanami dengan padi. Tuan tanah tersebut mempekerjakan 3 buruh tani, berikut ini rincian biaya yang dikeluarkan tuan tanah :

➤ Bibit padi 60 kg @ Rp1.000	= Rp60.000
➤ Sewa mesin pembajak sawah	= Rp2.000.000
➤ Tenaga kerja 60 hari kerja @ Rp70.000	= Rp4.200.000
➤ Pupuk 200 kg @ Rp500	= Rp100.000
➤ Pestisida 15 liter @ Rp 40.000	= Rp600.000
➤ Hasil Produksi 3000 Kg @5.000	= Rp15.000.000
➤ Keuntungan	= Rp8.040.000

Biaya antara yang dikeluarkan oleh tuan tanah meliputi biaya pembelian bibit, pupuk, dan pestisida. Total biaya antara sebesar Rp760.000 , sehingga nilai tambah (*added value*) dari unit usaha pertanian si tuan tanah sebesar Rp15.000.000 – Rp760.000 yaitu Rp14.240.000. Nilai tambah ini yang dinikmati oleh masyarakat setempat (tuan tanah, buruh tani, penyewa mesin bajak, dll.) dari kegiatan usaha

pertanian mereka, dengan catatan masih dikurangi dengan penyusutan dan pajak. *Added value* ini yang dicatat oleh BPS Kota/Kabupaten untuk kemudian dimasukkan dalam PDRB sektor Pertanian.

2.4 Sektor Ekonomi Unggulan dan Non-Unggulan

2.4.1 Konsep Dasar Sektor Ekonomi Unggulan

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diterbitkan oleh BPS terdiri dari banyak sektor. Ada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, manufaktur, dll. Berbagai sektor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sektor unggulan dan sektor non-unggulan.

Sektor unggulan atau sering disebut juga sektor basis adalah sektor yang dihasilkan oleh suatu wilayah dimana konsumennya adalah masyarakat wilayah tersebut dan masyarakat wilayah lain melalui mekanisme ekspor (Fanning, 2014). Ekspor yang dimaksud tidak hanya penjualan antar-negara, tetapi penjualan antar kota dan kabupaten juga termasuk didalamnya.

Sebagai contoh, sektor unggulan kota A adalah sektor konstruksi, maka barang dan/atau jasa konstruksi yang dihasilkan oleh kota A digunakan/dikonsumsi oleh masyarakat kota A dan juga kota lain (kota B, C, D, dll.) melalui mekanisme ekspor. Alasan utama kegiatan ekspor ini adalah pemaksimalan profit. Barang dan/atau jasa yang diekspor ke wilayah lain adalah produk yang kuantitasnya sangat banyak sehingga melampaui kurva permintaan. Ketika barang yang ditawarkan lebih banyak daripada barang yang diminta, maka harga barang tersebut akan cenderung turun (*oversupply*). Dengan demikian, profit yang dicetak akan semakin

tergerus. Solusi agar harga cenderung stabil adalah mengalihkan *supply* tersebut ke wilayah lain yang membutuhkan barang tersebut. Alhasil, barang tersebut kembali pada kondisi ekuilibrium tanpa menurunkan harganya. Bahkan harga barang berpotensi naik jika daya beli (*purchasing power*) masyarakat di wilayah lain akan barang ekspor tersebut lebih tinggi daripada masyarakat di wilayah asal barang tersebut diproduksi.

2.4.2 Efek Pengganda (Multiplier Effect) dalam Sektor Unggulan

Sektor unggulan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor unggulan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara agregat. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya efek pengganda (*multiplier effect*) dari sektor unggulan tersebut (Fanning, 2014).

Peningkatan PDRB di sektor unggulan membawa keberkahan bagi sektor lain yang terdapat di PDRB. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang sangat beragam. Sebagai contoh, kota Medan memiliki sektor unggulan berupa sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini membuat lapangan kerja di kota tersebut semakin luas dan gaji yang dijanjikan lebih tinggi dari kota lain yang berada di sekitarnya. Hal ini membuat masyarakat dari kota lain berpindah ke kota Medan untuk mengadu nasib dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Ketika masyarakat bermigrasi ke kota Medan, setidaknya mereka membutuhkan tiga kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan. Mereka akan mencari rumah untuk mereka huni. Hal ini membuat sektor real estat bertumbuh.

Mereka membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup maupun sebagai *gaya hidup*. Hal ini membuat sektor akomodasi dan makan minum bertumbuh. Selain itu, mereka juga membutuhkan pendidikan untuk anak-anaknya. Dengan demikian sektor jasa pendidikan juga bertumbuh.

Keberadaan *multiplier effect* ini didukung oleh berbagai riset. Salah satunya oleh hasil penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumatera Utara” dari Lembaga Penelitian Unimed Tahun 2015 yang menyatakan jika terjadi peningkatan 1% pada sektor unggulan pertanian, pertumbuhan ekonomi di semua sektor meningkat 0,86% (Nasir, 2015).

2.4.3 Sektor Non Unggulan

Sektor non unggulan adalah kebalikan dari sektor unggulan. Sektor non unggulan adalah sektor yang barang dan/atau jasanya hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal yang memproduksi barang dan/atau jasa tersebut (Fanning, 2014). Tidak ada mekanisme ekspor barang dan/atau jasa dari sektor ini ke daerah lain. Dengan demikian masyarakat non-lokal tidak dapat menikmatinya.

Penyebab ketiadaan ekspor ini adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut memiliki kuantitas yang lebih sedikit daripada kebutuhan masyarakat lokal akan barang dan/atau jasa tersebut. Akibatnya, pertumbuhan sektor non unggulan atau sering disebut sektor non basis hanya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat lokal (Tarigan, 2005). Permintaan masyarakat lokal dapat meningkat apabila pendapatan masyarakat lokal meningkat sehingga daya beli mereka meningkat.

Pertumbuhan sektor non unggulan tidak dapat melampaui pertumbuhan ekonomi wilayah secara agregat (Tarigan, 2005). Sementara, sektor unggulan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melebihi pertumbuhannya alamiahnya.

2.4.4 Metode Penentuan Sektor Unggulan dan Sektor Non Unggulan

Terdapat beberapa metode dalam menentukan sektor unggulan dan sektor non unggulan yaitu metode *location quotient*, *shift share*, model rasio pertumbuhan, dan *overlay*. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam suatu metode. Dengan menggunakan beragam metode, tiap metode dapat saling meng-*cover* kelemahan yang ada. Karakteristik tiap metode akan dijelaskan lebih detail pada sub bab selanjutnya.

2.5 Analisis Location Quotient (LQ)

Metode Location Quotient (LQ) adalah salah satu metode yang dapat menganalisis sektor unggulan dan non unggulan suatu wilayah. Dalam KTTA ini, wilayah yang dianalisis adalah kota Medan. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, sektor unggulan adalah sektor yang dapat mengakomodasi seluruh permintaan wilayah lokal akan sektor tersebut, bahkan terjadi kelebihan penawaran. Dengan demikian, kelebihan ini diekspor ke wilayah lain.

Metode ini menentukan sektor unggulan berdasarkan hasil bagi (*quotient*) antara persentase tenaga kerja/nilai tambah sektor tertentu di wilayah yang ingin dianalisis (*local area*) dengan persentase tenaga kerja/nilai tambah sektor tertentu di wilayah yang lebih besar (*parent area*) (Fanning, 2014). *Local area* adalah wilayah yang ingin dianalisis dengan luas wilayah yang lebih sempit, misalnya kota

Medan. Sedangkan *parent area* adalah wilayah lebih luas dan didalamnya terdapat *local area* tersebut, misalnya Sumatera Utara. (Fanning, 2014).

Variabel yang dipakai metode *location quotient* adalah tenaga kerja atau nilai tambah. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, nilai tambah suatu wilayah dituangkan dalam PDB dan PDRB. Oleh sebab itu, metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Fanning, 2014) :

$$LQ_i = \frac{E_{ir}/E_r}{E_{in}/E_n} = \frac{Y_{ir}/Y_r}{Y_{in}/Y_n}$$

Keterangan :

- LQ_i = *Location quotient* pada sektor i
- E_{ir} = Jumlah tenaga kerja sektor i di wilayah yang lebih kecil (*local area*)
- E_r = Jumlah tenaga kerja seluruh sektor di *local area*
- E_{in} = Jumlah tenaga kerja sektor i di wilayah yang lebih besar (*parent area*)
- E_n = Jumlah tenaga kerja seluruh sektor di *parent area*
- Y = Nilai tambah atau PDB atau PDRB

Apabila $LQ_i > 1$, sektor i adalah sektor unggulan. Jika $LQ_i < 1$, sektor i adalah sektor non unggulan. Selanjutnya adalah penjelasan fundamental dari ketetapan ini agar rumus ini tidak menjadi hafalan semata.

Kondisi $LQ_i > 1$ terjadi apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Pembilang menggambarkan persentase pendapatan sektor i di *local area*. Penyebut menggambarkan persentase pendapatan sektor i di *parent area*. Dengan kata lain penyebut ini menggambarkan rata-rata persentase pendapatan sektor yang dihasilkan oleh beberapa *local area* yang merupakan bawahan dari *parent area*.

Sebagai ilustrasi, kota Medan adalah *local area*. Sumatera utara adalah *parent area* yang terdiri dari beberapa *local area* seperti kota Medan, kota Binjai,

dll. Misalnya, sektor yang diteliti adalah sektor manufaktur. Penyebut sebesar 20%, artinya sektor manufaktur menyumbang 20% bagi pendapatan kota Medan. Pembilang sebesar 12%, artinya sektor manufaktur menyumbang 12% bagi pendapatan provinsi Sumatera Utara. Secara substansi, 12% adalah rata-rata persentase yang dimiliki kota dan kabupaten di Sumatera Utara.

Artinya, persentase manufaktur di kota Medan (penyebut) lebih besar dari persentase rata-rata kota dan kabupaten di Sumatera Utara (pembilang). Sektor manufaktur berada pada posisi di atas rata-rata, sehingga disebut sebagai sektor unggulan.

Metode ini memiliki kelemahan terkait produktivitas rata-rata atau konsumsi rata-rata (Tarigan, 2005). Sebagai ilustrasi, bisa saja kota Medan memiliki pendapatan sektor pendidikan yang lebih besar dari rata-rata pendapatan sektor pendidikan di kota dan kabupaten yang berada di Sumatera karena permintaan jasa pendidikan di kota Medan lebih besar dari rata-rata permintaan jasa pendidikan kota dan kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Singkatnya, pendapatan jasa pendidikan yang sangat besar didapat dari masyarakat kota Medan saja yang mana permintaan mereka akan pendidikan sangat tinggi. Pada kasus ini tidak ada ekspor ke wilayah lain. Sementara, syarat utama dari sektor unggulan adalah adanya mekanisme ekspor ke wilayah lain. Oleh sebab itu, metode *location quotient* dibatasi oleh asumsi bahwa tingkat konsumsi antar *local area* cenderung sama.

2.6 Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* adalah metode untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah serta mengetahui penyebab dari pertumbuhan tersebut (Sjafrizal, 2018). Analisis pada model *shift share* lebih kompleks daripada analisis pada model location quotient. Hal ini disebabkan oleh adanya penjelasan terkait penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam model *shift share* (Tarigan, 2005).

Senada dengan penjelasan di atas, analisis *shift share* menguraikan pergeseran struktur perekonomian suatu wilayah yang sempit seperti kota/kabupaten terhadap struktur perekonomian wilayah yang lebih luas seperti provinsi (Putra & Fadilah, 2011).

Pembeda antara *shift share* dengan *location quotient* adalah kehadiran identifikasi faktor penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. *Shift share* memunculkan identifikasi tersebut, sedangkan *location quotient* sebaliknya. Ada tiga faktor utama penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu *national share*, *proportionality shift (mixed shift)*, dan *differential shift (competitive shift)* (Sjafrizal, 2018). Ketiga faktor ini akan dibahas detail pada paragraf selanjutnya.

Pertama, *national share* (N) adalah pengaruh pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih sempit. Jadi, pertumbuhan suatu wilayah bukan disebabkan oleh faktor internal melainkan oleh faktor eksternal yaitu pertumbuhan di wilayah yang lebih luas.

Sebagai ilustrasi, kota Medan adalah *local area* (area yang lebih sempit) dan provinsi Sumatera Utara adalah *parent area* (area yang lebih luas). Kota medan

mengalami pertumbuhan ekonomi di sektor i sebesar 6%. Dari total pertumbuhan tersebut, ternyata 5% nya adalah sumbangsih dari provinsi Sumatera Utara. Seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Utara cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi di sektor i dengan rata-rata 5%. Dengan demikian, kota Medan terdampak eksternalitas positif ini juga.

Dari 6% pertumbuhan sektor i di kota Medan, 5% penyebabnya adalah faktor eksternal yakni pertumbuhan di Sumatera Utara. Jika terjadi glorifikasi akan pertumbuhan 6% ini, maka glorifikasinya kurang tepat karena faktor utamanya adalah faktor eksternal bukan karena kehebatan kota Medan semata (faktor internal).

Kedua, *proportionality shift* (M) adalah salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yaitu struktur ekonomi daerah yang baik dimana kegiatan perekonomian fokus pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi di wilayah tersebut.

Ketiga, *Differential shift* (D) adalah faktor penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berupa kondisi khusus dari sektor perekonomian wilayah tersebut yang menentukan kemampuan sektor perekonomian wilayah tersebut bersaing dengan sektor yang serupa di tingkat wilayah yang lebih tinggi, misalnya provinsi.

Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam analisis *shift share* (Fanning, 2014) :

$$SSA \text{ (Shift Share Analysis)} = (a) \quad (b) \quad (c) \\ = (R \times E_0) + [(R_i - R) \times E_0] + [(r - R_i) \times E_0]$$

Keterangan :

a = regional share (N)

$b = \textit{proportionality shift (M)}$

$c = \textit{differential shift (C)}$

$E =$ jumlah tenaga kerja di wilayah yang lebih kecil, seperti kota Medan

$R =$ pertumbuhan total tenaga kerja di wilayah yang lebih besar, misalnya Sumut

$R_i =$ pertumbuhan tenaga kerja sektor i di wilayah yang lebih besar

$r_i =$ pertumbuhan tenaga kerja sektor I di wilayah yang lebih kecil

Apabila *proportionality shift (M)* < 0 , maka sektor i pada wilayah yang dianalisis (kab/kota) mempunyai pertumbuhan yang lambat. Jika $M > 0$, maka sektor i pada wilayah yang dianalisis (kab/kota) mempunyai pertumbuhan yang cepat.

Apabila *differential shift (C)* < 0 , maka sektor i pada wilayah yang dianalisis (kab/kota) mempunyai daya saing yang rendah terhadap sektor I di wilayah yang lebih besar. Jika $C > 0$, maka sektor i pada wilayah yang dianalisis (kab/kota) mempunyai daya saing yang rendah terhadap sektor I di wilayah yang lebih besar.

Pertumbuhan sektor tertentu pada wilayah yang dianalisis digambarkan oleh *shift neto (SN)* yang memiliki rumus :

$$SN = M + C$$

Apabila $SN > 0$, maka perkembangan sektor i di wilayah yang dianalisis memiliki pertumbuhan yang progresif. Jika $SN < 0$, maka perkembangan sektor i di wilayah yang dianalisis memiliki pertumbuhan yang tidak progresif/lambat.

Terdapat empat tipe sektor ekonomi berdasarkan *proportionality shift (M)* dan *differential shift (C)* yakni sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

- Tipe I (M positif, C positif) adalah sektor ekonomi yang bertumbuh sangat cepat dan memiliki daya saing tinggi.

- Tipe II (M negatif, C positif) adalah sektor ekonomi yang bertumbuh lambat, namun percepatannya masih dapat bertambah karena daya saingnya yang tinggi.
- Tipe III (M positif, C negatif) adalah sektor ekonomi yang bertumbuh dengan cepat, namun berdaya saing rendah.
- Tipe IV (M negatif, C negatif) adalah sektor ekonomi yang bertumbuh lambat dan berdaya saing rendah.

2.7 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Model rasio pertumbuhan adalah alat analisis potensi pertumbuhan sektor ekonomi suatu wilayah yang merupakan hasil pengembangan dari model *shift share* (Yusuf, 1999). Berikut ini rumusan matematis dari model rasio pertumbuhan :

1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RP_S)

Rasio ini membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan sektor i di wilayah yang lebih besar (wilayah referensi).

Berikut ini rumus matematis RP_S :

$$RP_S = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij}(t)}{\Delta E_{iR} / E_{iR}(t)}$$

Keterangan :

ΔE_{ij} = perubahan PDRB sektor i di wilayah studi pada rentang waktu tertentu

$E_{ij}(t)$ = PDRB sektor i di wilayah studi pada tahun dasar

ΔE_{iR} = perubahan PDRB sektor i di wilayah referensi pada rentang waktu tertentu

$E_{iR}(t)$ = PDRB sektor i di wilayah referensi pada tahun dasar

2. Rasio pertumbuhan Wilayah Referensi (RP_R)

Wilayah referensi adalah wilayah yang lebih besar dan melingkupi wilayah studi. Sebagai contoh, provinsi Sumatera Utara adalah wilayah referensi dari kota Medan (wilayah studi). Rasio ini membandingkan laju pertumbuhan sektor *i* di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan seluruh sektor di wilayah referensi. Berikut ini rumus matematisnya :

$$RP_R = \frac{\Delta E_{iR} / E_{iR}(t)}{\Delta E_R / E_R(t)}$$

Keterangan :

ΔE_R = perubahan total PDRB di wilayah referensi

$E_{R(t)}$ = perubahan total PDRB di wilayah referensi pada tahun dasar

Nilai dari RP_S dan RP_R dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu positif dan negatif. Apabila RP_S lebih dari satu (>1), RP_S diklasifikasikan positif. Artinya, laju pertumbuhan sektor *i* di wilayah studi lebih besar daripada laju pertumbuhan sektor *i* di wilayah referensi. Apabila RP_S kurang dari satu (<1), RP_S diklasifikasikan negatif. Artinya, laju pertumbuhan sektor *i* di wilayah studi lebih kecil daripada laju pertumbuhan sektor *i* di wilayah referensi

Apabila RP_R lebih dari satu (>1), RP_R diklasifikasikan positif. Artinya, laju pertumbuhan sektor *i* di wilayah referensi lebih besar dari laju pertumbuhan keseluruhan sektor (PDRB) di wilayah referensi. Apabila RP_R kurang dari satu (<1), RP_R diklasifikasikan negatif. Artinya, laju pertumbuhan sektor *i* di wilayah referensi lebih kecil dari laju pertumbuhan keseluruhan sektor (PDRB) di wilayah referensi.

Adanya pengklasifikasian RP_S dan RP_R menjadi positif dan negatif menghasilkan beberapa kombinasi, yakni sebagai berikut (Yusuf, 1999) :

1. RP_S bernilai positif (+) dan RP_R bernilai positif (+). Artinya, pertumbuhan ekonomi sektor i menonjol di wilayah studi dan di wilayah referensi.
2. RP_S bernilai positif (+) dan RP_R bernilai positif (-). Artinya, pertumbuhan ekonomi sektor i menonjol di wilayah studi, sedangkan pada wilayah referensi tidak menonjol.
3. RP_S bernilai positif (+) dan RP_R bernilai positif (-). Artinya, pertumbuhan ekonomi sektor i tidak menonjol di di wilayah studi, sedangkan pada wilayah referensi menonjol.
4. RP_S bernilai positif (-) dan RP_R bernilai positif (-). Artinya, pertumbuhan ekonomi sektor i tidak menonjol di di wilayah studi, sedangkan pada wilayah referensi menonjol.

2.8 Analisis Overlay

Analisis *overlay* berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan non unggulan dengan cara menggabungkan hasil dari analisis Location Quotien (LQ), shift share, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) (Atmanti & Jopie, 2018). Terdapat dua produk dari analisis MRP yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR). Analisis *overlay* hanya menggunakan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs).

Dengan menggunakan kombinasi dari tiga alat ukur sektor unggulan, kesimpulan terkait sektor unggulan suatu wilayah akan semakin kokoh. Hal ini dikarenakan tiap alat ukur punya kelebihan dan kekurangan yang membuat satu alat

ukur dapat meng-*cover* kekurangan alat ukur lainnya melalui kelebihan yang dimilikinya.

Analisis *Location Quotient (LQ)* menghasilkan analisis sektor unggulan dan non unggulan berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki sektor tersebut. Analisis *shift share* menghasilkan produk berupa progresivitas pertumbuhan sektor ekonomi beserta penyebabnya. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) khususnya Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) menghasilkan analisis apakah suatu sektor memiliki pertumbuhan dominan di wilayah studi .

Hasil analisis *overlay* ditentukan oleh nilai positif atau negatif pada ketiga alat ukur di atas. *Location Quotient (LQ)* bernilai positif (+) jika $LQ > 1$. Analisis *shift share* bernilai positif (+) jika $SN > 1$. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) bernilai positif (+) jika $RPs > 1$. Hal yang sebaliknya berlaku pada nilai negatif.

Jika suatu sektor memiliki tiga (3) hasil positif dari ketiga alat ukur tersebut, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor unggulan dengan memiliki pertumbuhan progresif laju dan pertumbuhan yang cenderung meningkat akibat daya saing yang tinggi.

Jika suatu sektor memiliki dua (2) hasil positif dari ketiga alat ukur tersebut, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor yang berpotensi dan nyaris menjadi sektor unggulan.

Jika suatu sektor memiliki satu (1) hasil positif dari ketiga alat ukur tersebut, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non unggulan.

Jika suatu sektor memiliki nol (0) hasil positif dari ketiga alat ukur tersebut, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai non unggulan yang memberi kontribusi sangat kecil pada wilayah yang dianalisis.

2.9 Penelitian Terdahulu

Loren Surmila, marseto dan Sishadiyati (2021) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan*. Penelitian ini menggunakan metode *location quotient* (LQ), *shift share*, tipologi klassen, dan analisis kontribusi. Data yang diolah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan 2011-2019 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara 2011-2019. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada 12 sektor unggulan kota Medan. Adapun sektor Industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang kontribusi terbesar bagi perekonomian kota Medan tahun 2011-2019 (Surbakti, Marseto, & Sishadiyati, 2021).

Ayuna Hutapea, Rosalina A.M Koleangan, Ita P.F. Rorong (2020) melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Sektor Basis dan Non Basis Serta Daya Saing Ekonomi Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan*. Penelitian ini menggunakan metode analisis *location quotient* (LQ), *shift share*, dan klasen tipologi. Data yang dipakai dalam proses analisis adalah Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan 2011-2018 dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara 2011-2018. Terdapat 12 sektor basis kota Medan 2011-2018 yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;

konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. (Hutapea, Koleangan, & Rorong, 2020).

M. Nasir (2015) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*. Dalam menentukan sektor unggulan, penelitian ini menggunakan metode *location quotient* (LQ). Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara 2011-2013.

Eka Rima Prasetya (2018) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Bogor*. Penelitian ini menggunakan metode *location quotient* (LQ) dan *shift share*. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bogor 2012-2016 dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat 2012-2016. Sektor unggulan yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor penyediaan air (Prasetya, 2018)

Hendrianto Sundaro (2021) melakukan penelitian dengan judul *Studi Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan Kabupaten Semarang*. Penelitian ini menggunakan metode *location quotient* (LQ), tipologi klassen, *shift share*, dan analisis kompilasi. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Semarang 2014-2018 dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah 2014-2018. Sektor unggulan yang menduduki peringkat pertama

adalah sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan; sektor konstruksi (Sundrato, 2021).